

PERJANJIAN KERJASAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE DENGAN

PEMERINTAH KOTA TERNATE

Nomor : **HK.02.00/15/MoU/2020.**

Nomor : 015/SETDA/2020.

TENTANG

DUKUNGAN PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2020

Pada hari ini JUMAT, tanggal SEBELAS bulan SEPTEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH bertempat di TERNATE, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : KIFLI SAHLAN, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Ternate
Alamat : Jalan Cempaka Nomor 345 Kel. Tanah Tinggi – Kota Ternate
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : Dr.H.BURHAN ABDURAHMAN,SH.MM
Jabatan : Walikota Ternate
Alamat : Jalan Pah. Revolusi NomorKel. Muhajirin – Kota Ternate
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);

Handwritten signature

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020; dan
- b. bahwa dukungan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diimplementasikan dalam bentuk partisipasi Pemerintah Daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN BERSAMA

- (1) Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Ternate dengan mewujudkan penegakan disiplin ASN dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Kelurahan,
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan dukungan dalam rangka penegakan disiplin ASN melalui fasilitasi dan koordinasi, dan mendorong upaya peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan melalui gerakan Kampung Pemilih Bermartabat (KALIBER).

Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Ternate dengan

Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani OLEH para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
BAWASLU KOTA TERNATE
Ketua

KH. SAHLAN, S.Pd

PIHAK KEDUA,
WALIKOTA TERNATE

Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, SH.MM